



for a living planet

EDISI : SEPTEMBER - DESEMBER 2009

suara

Tesso Nilo



<http://www.wwf.or.id/tessonilo>



Pelaku Pembunuhan Harimau Sumatera Hanya Divonis Ringan



Video Jebak WWF Untuk Pertama Kalinya Rekam Gambar Induk & Anak Harimau Sumatera

Pembaca yang budiman ,

SELAMAT BERJUMPA KEMBALI dengan buletin Suara Tesso Nilo. Kami menyampaikan “Selamat Tahun Baru 2010” semoga tahun ini membawa kesuksesan bagi kita semua dan bagi upaya konservasi. Di edisi penutup tahun 2009 ini, buletin Suara Tesso Nilo tampil dengan wajah baru menyambut tahun 2010 dengan lebih bersemangat. Dengan tampilan dan semangat baru ini, kami berharap dapat menyuguhkan informasi yang lebih baik. Untuk itu kritik dan saran dari pembaca sangat kami harapkan agar buletin ini tetap mendapat tempat di hati pembaca sekalian.

Di Riau sepanjang tahun 2009 tercatat enam harimau sumatera dan 9 ekor gajah sumatera mati sementara itu dua orang cedera karena diserang harimau. Dibalik kabar buruk ini, kabar yang menggembirakan datang dari penegakan hukum terhadap pelaku perburuan harimau dimana dua orang pelaku perburuan harimau di Kabupaten Indragiri Hilir dijatuhi hukuman satu tahun penjara. Ini adalah suatu kemajuan yang sangat penting bagi penegakan hukum terhadap kejahatan kehutanan karena sepanjang (paling tidak) satu dekade terakhir penegakan hukum seperti sangat minim. Namun sangat disayangkan juga bahwa vonis yang diberikan sangat rendah sehingga dikhawatirkan tidak dapat memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan serupa.

Walaupun demikian, penegakan hukum terhadap kematian harimau tersebut pantas diapresiasi dan seharusnya menjadi momentum untuk kemajuan penegakan hukum terhadap kejahatan kehutanan di Riau khususnya. Kabar baik terhadap upaya konservasi harimau juga terbersit tahun 2009 dimana pada Oktober lalu video trap penelitian populasi dan distribusi harimau sumatera kerjasama WWF –Indonesia dan PHKA berhasil merekam satu keluarga harimau. Ini sungguh suatu kejadian langka, namun keberhasilan ini menyisakan tanya akankah mereka sanggup bertahan di tengah ancaman habitat mereka yang semakin besar?

Lemahnya penegakan hukum terhadap kematian satwa dilindungi seperti harimau dan gajah baik karena konflik atau perburuan menjadi penyebab berulangnya kejadian tersebut. Oleh karena itu salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menekan laju kepunahan satwa dilindungi tersebut adalah dengan mengintensifkan penegakan hukum. Upaya penegakan hukum terhadap kematian harimau di Indragiri Hilir adalah menjadi laporan utama kami pada edisi kali ini.

Sementara itu, bagaimana upaya penanganan konflik manusia-gajah di Riau yang meng highlight kematian gajah sepanjang 2009, road show menuju terwujudnya Strategi Konservasi Gajah Riau kami sajikan pada rubrik Mitigasi Konflik Manusia-Gajah. Strategi Konservasi Gajah di Riau adalah hal yang mendesak untuk diadakan untuk mencari solusi tepat terhadap penanganan kondisi populasi dan habitat gajah sumatera yang pada beberapa tempat di Riau sudah dalam kondisi kritis. WWF bersama dengan BBKSDA Riau didukung oleh pemerintah kabupaten melakukan sosialisasi penanganan konflik manusia-gajah untuk mendapatkan masukan guna penyusunan strategi tersebut.

Suara Tesso Nilo, adalah buletin yang dipublikasikan oleh WWF ID Program Riau. Penanggung Jawab: Suhandri **Editor:** Syamsidar **Redaksi:** Nursamsu, Dani Rahadian, Syamsidar, M. Yudi Agusrin, Afdhal Mahyudin
Alamat Redaksi: Perkantoran Grand Sudirman B.I., Jl. Dr. Setia Maharaja - Pekanbaru. **Telp/Fax:** (0761) 855006, 35323. **email:** tessonilo@wwf.or.id **website:** www.wwf.or.id/tessonilo

Tidak lupa kami kabarkan berita gembira yaitu terwujudnya perluasan Taman Nasional Tesso Nilo hingga menjadi ± 83.000 ha. Tesso Nilo telah lama diupayakan untuk menjadi kawasan konservasi gajah sebagai alternatif pemecahan permasalahan konflik manusia-gajah di Riau. Dari sembilan kantong habitat gajah yang tersisa di Riau, kawasan Tesso Nilo merupakan kantong yang memiliki populasi terbesar dan ideal untuk dipertahankan sebagai habitat gajah sumatera. Pasca, perluasan pekerjaan rumah yang sangat besar menanti kita yaitu penanganan perambahan di kawasan hutan tersebut. Perluasan dan penanganan perambahan di Tesso Nilo telah menjadi komitmen bersama Departemen Kehutanan, pemerintah Provinsi Riau dan Kabupaten Pelalawan, oleh karena itu upaya untuk menangani permasalahan tersebut harus kita dukung.

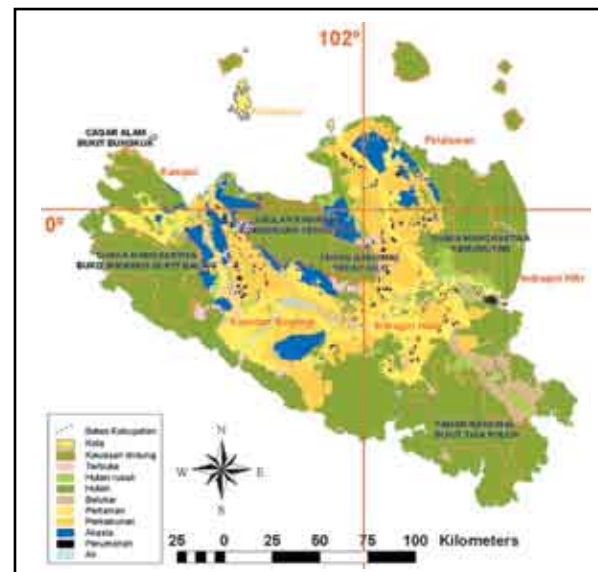
Sebagai salah satu langkah nyata untuk mengembalikan fungsi Taman Nasional Tesso Nilo yang telah terdegradasi, Balai Taman Nasional Tesso Nilo bersama WWF-Indonesia melakukan gerakan menanam pohon pada Bulan Desember lalu. Kegiatan yang dibuka oleh Bupati Pelalawan, Rustam Effendi ini melibatkan generasi muda dari pelajar tingkat SLTA.

Kami ucapkan selamat membaca.

Wassalam,
Suhandri
Program Manager

DAFTAR ISI

- hal 3.* Pelaku Pembunuhan Harimau Sumatera Hanya Divonis Ringan
- hal 6.* Penanganan Konflik Manusia - Gajah di Riau
- hal 8.* Sedikit Fakta Tentang Operasional Flying Squad
- hal 10.* Roadshow Konservasi Gajah di 6 Kabupaten di Riau
- hal 12.* TN. Tesso Nilo Diperluas Menjadi 83 Ribu Hektar
- hal 13.* Pengamanan Taman Nasional Tesso Nilo
- hal 14.* Harimau Sumatera, Ancaman Menuju Kepunahan yang Memilukan
- hal 16.* Video Jebak WWF Rekam Pertama Kali Induk dan Anak Harimau
- hal 18.* Madu Sialang Menuju Sertifikasi Produk Organik
- hal 20.* Restorasi Taman Nasional Tesso Nilo



TESSO NILO BUKIT TIGAPULUH LANSKAP meliputi 5 kawasan konservasi yang terdiri dari Taman Nasional Tesso Nilo, Taman Nasional Bukit Tigapuluh, Suaka Margasatwa Bukit Rimang-Bukit Baling, Suaka Margasatwa Kerumutan dan Suaka Margasatwa Bukit Bungkok dengan luas 300.000 ha. Taman Nasional Tesso Nilo berada diantara keempat kawasan konservasi yang ada di dalam lanskap tersebut dengan luas 83.068 ha. Ketersambungan di antara kawasan-kawasan konservasi dalam lanskap tersebut diharapkan memberikan keberlangsungan kehidupan satwa dilindungi untuk jangka panjang.



Pelaku Pembunuhan Harimau Sumatera Hanya Divonis Ringan

SETELAH MELEWATI PROSES PERSIDANGAN SELAMA KURANG LEBIH TIGA BULAN, akhirnya pada 8 Oktober 2009 Majelis Hakim kasus pembunuhan tiga ekor harimau sumatera di Pengadilan Negeri Tembilahan membacakan putusannya. Kedua terdakwa kasus ini dijatuhi hukuman satu tahun penjara dan denda dua juta rupiah. Sungguh ini satu hukuman yang ringan untuk kasus kematian tiga harimau yang terjadi dalam kurun waktu bersamaan. Padahal disisi lain, putusan ini diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan satwa dilindungi tersebut. Menyusul putusan majelis hakim ini Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau melakukan upaya banding terhadap kasus ini. Kini kasus ini tengah diproses di Pengadilan Tinggi Riau.

Kematian tiga ekor harimau ini terjadi pada pertengahan Februari lalu di Desa Tanjung Pasar Simpang Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir. Tiga harimau tersebut masuk dalam perangkap yang dipasang oleh dua orang masyarakat yang dipercayai sebagai pawang harimau oleh warga sekitar. Setelah terjerat, ketiga nasib harimau berakhir diujung tombak. Adalah M. Ajad Bin Abdulllah dan Mistar Bin Ajad yang melakukan pemasangan jerat dengan dibantu oleh masyarakat. Kedua tersangka ini kemudian diproses oleh PNS (Penilik Pegawai Negeri Sipil) dari BBKSDA Riau(Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam). Setelah mendapatkan cukup bukti, kasus ini diajukan ke

Pengadilan Negeri Tembilahan pada 4 Juni 2009 dan sidang pertama kasus ini digelar pada 1 Juli 2009.

Dari fakta-fakta dipersidangan kedua tersangka dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana karena:

- dengan sengaja menangkap dan melukai harimau sumatera
- dengan sengaja memperniagakan bagian tubuh harimau sumatera
- dengan sengaja menyimpan tengkorak dan kulit harimau sumatera

Untuk itu kedua tersangka dijerat dengan undang-undang No.5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pasal 40 ayat 2 yang menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Tidak lama berselang dari kematian tiga harimau ini, dua orang warga Desa Simpang Gaung, Kecamatan Gaung (Maman dan Toni) yang tengah mencari ikan diterkam harimau. Lokasi kejadian tepatnya berada pada konsesi PT. Mutiara Sabuk Katulistiwa. Kedua korban sempat bertarung hebat dengan seekor harimau betina sehingga menyebabkan keduanya terluka cukup parah dan begitu juga sang harimau. Namun kedua korban akhirnya selamat setelah dirawat beberapa hari di rumah sakit Puri Husada-Tembilahan. Sementara itu keesokan harinya, beberapa masyarakat yang kembali ke lokasi kejadian menemukan harimau yang terluka tersebut dan memburunya hingga akhirnya mati. Kematian ini tentu saja membuat jumlah kematian harimau menjulang tinggi karena kurang dari satu minggu empat ekor harimau Sumatera mati.



	2005	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Harimau mati akibat perburuan	10	8	9	5	2	34 ekor
Harimau mati akibat konflik	2	7	2	1	4	16 ekor
Korban jiwa	2	3	-	-	-	5 orang
Korban cedera	9	3	-	-	4	16 orang

Tabel Konflik dan Perburuan Harimau Sumatera (2005-2009)di Riau

Lokasi kematian keempat harimau sumatera ini merupakan bagian dari blok hutan Kerumutan. Tempat kematian tiga harimau pertama terjadi di kawasan perkampungan sementara itu lokasi harimau keempat berada pada kawasan konsesi milik PT. Sabuk Katulistiwa. Meskipun kawasan ini dibawah konsesi perusahaan pada kenyataannya kawasan tersebut telah mengalami degradasi. Rusaknya habitat alami ini merupakan penyebab terjadinya konflik manusia-satwa liar di kawasan tersebut dimana harimau pun harus mencari mangsa berupa ternak ke pemukiman.

Kerumutan merupakan salah satu habitat potensial bagi harimau hal ini terbukti karena satu tim yang terdiri dari para peneliti harimau internasional mengklasifikasikan blok hutan Bukit Tigapuluh sebagai sebuah prioritas global kawasan konservasi harimau, sedangkan lahan gambut Kampar dan Kerumutan Riau dikategorikan penting secara regional, dan Tesso Nilo serta Rimbang Baling sebagai prioritas-prioritas jangka panjang. Tanpa adanya kawasan-kawasan ini, harimau Sumatera di Riau akan lenyap. Setelah tahun 2000, konversi hutan mulai berfokus pada lahan gambut di Riau. Kanal-kanal yang panjang dan dalam memotong dan mengeringkan semua rawa-rawa pada lahan gambut. Pembangunan kanal yang kadang-kadang lebih dari kedalaman satu meter memberi akses bagi

para pembalak, liar atau tidak untuk dapat masuk menebang pepohonan dan menghanyutkan kayu-kayu tersebut. Gambut yang mengalami penipisan dan mengering menjadi sumber kebakaran nomor wahid (laporan WWF-Indonesia Februari 2008: Kesempatan bagi Riau Memilih Menjadi "Penyelamat" atau "Algojo" bagi Pemanasan Global, Harimau dan Gajah Sumatera)

Menurut catatan WWF (diolah dari berbagai sumber) dalam kurun waktu lima tahun terakhir sekitar 50 ekor harimau mati terbunuh baik karena konflik atau perburuan. Kematian harimau ini tersebar di berbagai kabupaten yang ada di Provinsi Riau yang menandakan bahwa ancaman terhadap kepunahan harimau terjadi hampir di semua kawasan yang menjadi habitatnya.

Kurang intensifnya penegakan hukum terhadap kegiatan yang mengancam populasi dan habitat harimau sumatera terus memberi ruang terjadinya kematian satwa langka dilindungi tersebut. Hutan yang menjadi habitat alami satwa terus berubah menjadi pemukiman baru dan perkebunan seperti sawit dan karet. Perambahan terjadi dimana-mana sehingga semakin meningkatkan intensitas konflik antara satwa dan manusia seperti gajah sumatera dan harimau sumatera. Hilangnya hutan berarti hilangnya habitat dan rusaknya sebuah ekosistem sehingga ada mata rantai yang terputus maka jika tidak ada upaya nyata untuk menanganinya konflik tersebut tetap akan terjadi dan tetap akan mengakibatkan kerugian pada kedua belah pihak;manusia atau satwa dilindungi tersebut.

Adanya permintaan terhadap harimau sumatera ataupun bagian-bagian tubuhnya seperti taring, kuku, kumis dan lain-lain yang oleh sekelompok masyarakat dipercayai memiliki kekuatan magis. menyebabkan perburuan dan perdagangan satwa ini tetap terjadi. Acapkali pula situasi konflik manusia-harimau dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk menangani konflik tesebut dengan cara yang tidak prosedural. Kematian satwa dilindungi baik akibat konflik atau perburuan dan perdagangan sangat sedikit yang diproses hukum. Kami mencatat bahwa dalam kurun waktu kurang lebih sepuluh tahun terakhir hanya tiga kasus perburuan dan perdagangan harimau dan gajah yang disidangkan yaitu kasus perburuan harimau di sekitar Bukit Tigapuluh pada tahun 2001 dan 2003 dan satu kasus perburuan gading di Mahato pada tahun 2005.

Penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan pada satwa dilindungi adalah cara yang dapat meredam kematian sia-sia harimau sumatera, gajah sumatera dan satwa dilindungi lainnya. Semoga para penegak hukum semakin tertantang untuk mengimplementasikan komitmennya dalam upaya mendukung perlindungan pada satwa-satwa terancam punah tersebut seiring dengan semangat reformasi hukum yang kini tengah bergulir di Indonesia, semoga!! (Syamsidar)

BBKSDA, PPH-PHKA & WWF:

Hukuman yang Minim Dikhawatirkan Menjadi Preseden Buruk Terhadap Penegakan Hukum pada Kasus Kejahatan Satwa Dilindungi

PEKANBARU –Majelis hakim sidang kasus perburuan liar, yang mengakibatkan terbunuhnya tiga ekor harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*), di Pengadilan Negeri Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Riau pada tanggal 8 Oktober 2009 menghukum dua terdakwa (M. Ajad bin Abdullah dan Mistar bin Ajad) dengan satu tahun penjara dan denda dua juta rupiah. Pada pembacaan putusannya, Ketua Majelis Hakim Wasdi Permana, SH,MH menyatakan bahwa kedua tersangka terbukti melakukan tindakan pidana dengan sengaja menangkap dan melukai harimau, dan sengaja memperniagakan dan menyimpan tengkorak dan kulit harimau sumatera. Majelis hakim menjerat kedua tersangka dengan undang-undang No.5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pasal 40 ayat 2. Hukuman ini jauh lebih ringan dari rencana tuntutan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum, Hendri Antoro pada 14 September yaitu tiga tahun penjara dan denda tiga juta rupiah kepada kedua tersangka.

Trisnu Danisworo, Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau menyayangkan dijatuhkannya hukuman yang ringan tersebut, meskipun di satu sisi dia juga memberikan apresiasi yang tinggi terhadap upaya penegakan hukum dalam kasus ini."Kejahatan terhadap satwa dilindungi merupakan kejahatan di bidang kehutanan yang serius, oleh karena itu upaya para penegak hukum dalam menegakkan hukum terhadap kasus ini patut diacungi jempol", kata Danisworo. Namun, hukuman yang diberikan kepada para pelaku tersebut dikhawatirkan tidak memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan serupa, termasuk di provinsi Riau.

Danisworo menambahkan bahwa BBKSDA Riau selaku penyidik dalam kasus ini akan melakukan upaya banding lewat Jaksa Penuntut Umum yang menangani kasus ini. "Kami berharap upaya banding ini nantinya dapat memberikan putusan hukuman yang memadai sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku, sehingga menimbulkan efek jera dan mengurangi laju perburuan dan perdagangan ilegal harimau".

Hal senada juga disampaikan oleh Ir. Lusman Pasaribu, Kasubdit Penyidikan dan Perlindungan Hutan Wilayah I, Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA). Menurutnya, hukuman yang minimal menunjukkan bahwa aparat penegak hukum belum sepenuhnya memberikan dukungan secara optimal terhadap upaya perlindungan satwa dilindungi dan hal ini dikhawatirkan dapat menjadi preseden buruk. "Kami berharap di masa yang akan datang aparat penegak hukum dapat memberikan dukungan yang lebih besar terhadap upaya perlindungan satwa dilindungi, sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing."

Kasus pembunuhan tiga ekor harimau Sumatera (*Phantera tigris sumatrae*) yang terjadi di Desa Tanjung Pasar Simpang Kecamatan Pelangiran- Indragiri Hilir-Riau pada Februari 2009 lalu mendapat perhatian yang serius dari para pegiat lingkungan



Sidang pembacaan vonis pelaku pembunuhan harimau di Pengadilan Negeri Tembilahan-Inhil

dan konservasi alam. Kematian tiga ekor harimau Sumatera dalam kurun waktu bersamaan merupakan catatan terburuk bagi konservasi. Hukuman maksimal terhadap pelaku kasus ini diharapkan menjadi langkah awal untuk proses penegakan hukum terhadap kejahatan kehutanan ini. Tidak intensifnya penegakkan hukum pada kejahatan seperti ini menjadi salah satu penyebab tingginya jumlah kematian satwa dilindungi seperti harimau dan gajah Sumatera di Riau.

Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir angka kematian harimau di Riau minimal 5 ekor per tahun baik karena konflik atau perburuan. Sementara itu dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir tercatat hanya ada dua kasus perburuan harimau yang diproses hukum.

Chairul Saleh, Kooordinator Konservasi Satwa Langka WWF-Indonesia menyatakan, "Kami kecewa dengan putusan ringan yang diberikan kepada para terdakwa karena kasus ini semestinya dapat menjadi pembelajaran untuk penanganan yang lebih baik terhadap kasus kejahatan satwa liar di propinsi Riau". Menurutnya, putusan yang memadai terhadap pelaku diharapkan dapat memudahkan upaya penegakan hukum kasus perburuan dan kasus perdagangan ilegal harimau lainnya, termasuk dalam memutus rantai perdagangan yang ada. "Dengan hukuman yang memadai, penegakan hukum diharapkan dapat menimbulkan efek jera dan menyentuh pihak-pihak lain yang terlibat dalam perdagangan ilegal harimau, misalnya penampung, pembeli dan eksportir".

Sementara itu Nuskan Syarif, Ketua Kelompok Studi Lingkungan Hidup (KSLH) Riau yang dari awal memantau persidangan kasus ini menyatakan, "Kami berharap proses banding yang tengah diupayakan BBKSDA-Riau nantinya akan dapat memberikan hukuman maksimal kepada pelaku sesuai dengan peraturan yang berlaku."(Rilis)



Pengukuran bangkai gajah yang ditemukan di areal konsesi PT. RAPP pada Desember 2009

Penanganan Konflik Manusia - Gajah di Riau

GAJAH MATI MENINGGALKAN GADING, HARIMAU MATI MENINGGALKAN BELANG, demikian bunyi sebuah pribahasa lama. Namun pepatah itu pada kenyataannya kini tak lagi demikian karena gajah mati tidak lagi meninggalkan gading dan harimau mati pun tak lagi meninggalkan belang. Tercatat bahwa hampir pada setiap kasus kematian gajah, gadingnya telah hilang sebelum bangkai gajah tersebut ditemukan, hal ini juga terjadi pada harimau dimana tak satu pun bagian tubuhnya tersisa.

Sepanjang tahun 2009 tercatat sembilan ekor gajah Sumatera mati di Riau, enam diantaranya ditemukan mati disekitar kawasan hutan Tesso Nilo sementara tiga lainnya merupakan gajah jinak (terlatih). Dua diantara gajah jinak yang merupakan penghuni Pusat Latihan Gajah- Minas tersebut ditemukan mati di Taman Hutan Raya Sultan Syarif Kasim pada awal Juni 2009, yang berbatasan dengan PLG tersebut. Sementara itu satu bulan setelahnya, seekor gajah jinak lainnya ditemukan mati di arboretum milik PT. Arara Abadi di Perawang Kabupaten Siak. Dan seolah untuk menutup tahun 2009, seekor bangkai gajah dilaporkan ditemukan di konsesi PT. Riau Andalan Pulp and Paper pada 9 Desember 2009. Lokasi kejadian tepatnya berada di Sektor Ukui yang berjarak sekitar 8 km dari Taman Nasional Tesso Nilo. Berdasarkan tinjauan di lapangan, gajah ini diperkirakan telah mati dua bulan sebelumnya dan merupakan gajah jantan yang ditandai dengan lobang



bekas pangkal gading pada tengkorak kepala bangkai gajah tersebut.

Sangat disayangkan kematian gajah terakhir di tahun 2009 baru diketahui setelah lama mati sehingga membuat bukti-bukti lapangan menjadi terbatas. Yang ditemukan di lokasi kejadian hanya kerangka gajah yang berserakan, namun masih dapat dipastikan sebagai gajah jantan. Sebenarnya lokasi kejadian bukanlah daerah yang jauh dari akses atau aktifitas manusia khususnya aktifitas kerja pihak perusahaan. Sudah seharusnya temuan lapangan menjadi langkah awal untuk mengustu kematian gajah ini. Termasuk kematian empat ekor gajah yang terjadi pada konsesi PT. Rimba Peranap Indah pada pertengahan tahun 2009. Pemegang konsesi seharusnya dapat mengantisipasi terjadinya kematian sia-sia satwa dilindungi tersebut bila benar-benar menerapkan monitoring terhadap kawasan konsesinya.



Kawasan dalam konsesi PT. RPI dimana terjadinya konflik manusia-gajah yang menyebabkan empat ekor gajah mati di pertengahan 2009. Hingga kini penyelidikannya belum selesai.

Kematian gajah sepanjang tahun 2009 justru terjadi di sekitar hutan Tesso Nilo yang merupakan kawasan yang diupayakan menjadi kawasan konservasi gajah. Kematian gajah di sekitar Tesso Nilo berawal dengan temuan empat ekor gajah mati dalam kawasan konsesi PT. Rimba Peranap Indah pada akhir Mei 2009 yang terdiri dari dua ekor gajah betina, dan dua ekor gajah jantan muda. Kedua pasang gading dari dua ekor gajah jantan tersebut tidak ditemukan lagi pada bangkai gajah tersebut bahkan salah satu dari gajah tersebut dibakar untuk menghilangkan jejak kematian gajah tersebut.

Dari hasil pengamatan di lapangan, lokasi kematian gajah masuk pada wilayah kantong gajah bagian Selatan kawasan hutan Tesso Nilo. Kelompok gajah ini memiliki wilayah jelajah dari wilayah Taman Nasional Tesso Nilo di bagian selatan hingga ke wilayah koridor HTI RAPP di bagian Selatan, termasuk wilayah eks HPH Nanjak Makmur dan wilayah Selatan Tesso Nilo dimana PT. RPI berada. Dari hasil cek labor, keempat gajah ini diperkirakan mati diracun. Namun sayang hingga akhir 2009, upaya untuk mengungkap pelaku yang menyebabkan kematian empat gajah ini belum dapat diungkap. Sementara itu, akibat terpisah dari kelompoknya yang diperkirakan merupakan bagian dari kelompok empat ekor gajah mati tersebut, tidak lama berselang dari kejadian kematian ini seekor anak gajah ditemukan tidak berdaya di sekitar konsesi PT. Rimba Lazuardi. Walaupun telah diberikan upaya pertolongan, akhirnya anak gajah tersebut tidak dapat diselamatkan.

Lemahnya komitmen untuk penegakan hukum terhadap kasus kematian gajah selama ini diyakini menjadi salah satu faktor penyebab terus terjadinya kematian gajah. Dari catatan WWF, di Riau belum ada kasus penegakan hukum terhadap kematian gajah baik karena perburuan atau konflik kecuali yang terjadi pada Agustus 2005 di Kabupaten Rokan Hulu. Saat itu, tiga orang pemburu ditembak mati oleh Kepolisian Rokan Hulu, sementara satu orang terluka dan enam batang gading gajah disita sebagai barang bukti. Kejadian yang telah menyebabkan kematian tiga ekor gajah sumatera ini akhirnya membawa satu pelaku kejahatan yang masih hidup tersebut menerima vonis 11,5 tahun penjara karena terbukti tidak hanya melakukan perburuan gajah sumatera sebagai satwa langka yang dilindungi tapi terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum seperti memiliki senjata api ilegal dan melawan petugas.

Sudah seharusnya upaya penegakan hukum seperti tersebut diatas diintensifkan agar dapat memberikan efek jera kepada pemburu satwa liar atau pun pihak-pihak tertentu yang melakukan pembunuhan terhadap gajah sumatera dengan dalih penanganan konflik. Namun yang terjadi adalah sebaliknya, pada 2006 tercatat 24 kematian gajah di Riau. Jumlah ini merupakan angka kematian yang tertinggi paling tidak selama sepuluh tahun terakhir. Dari kematian 24 ekor gajah tersebut, dua diantaranya diduga kuat akibat perburuan karena pada bangkai gajah ditemukan lubang bekas peluru senjata api. Walaupun bukti-bukti telah mengarah pada perburuan, tetap saja upaya penegakan hukum terhadap kasus ini tidak berjalan sebagaimana mestinya.

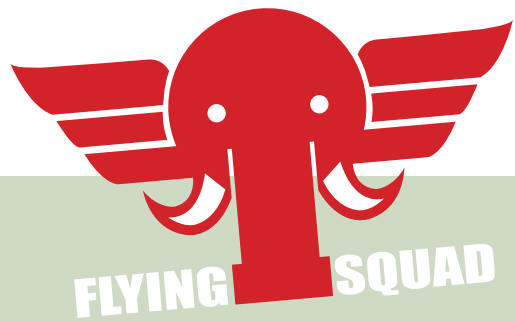
Jumlah kematian gajah jauh berkurang setelah tahun 2006 namun sayang kondisi tersebut tidak dapat bertahan karena angka itu kembali meningkat di tahun 2009 dengan total gajah mati sebanyak sembilan ekor. Konflik manusia-gajah tidak hanya membawa kerugian materil namun juga menyebabkan korban jiwa dan cedera. Terjadinya degradasi hutan pada sembilan kantong habitat gajah tersisa di Riau menjadi penyebab berulangnya konflik tersebut. Bila konflik terjadi, penanganan hanya dilakukan secara adhoc untuk meredam agar konflik tidak membawa korban bagi kedua belah pihak. Tersedianya rencana strategis konservasi gajah yang dapat memberikan penanganan konflik manusia jangka panjang dan komprehensif adalah menjadi suatu kebutuhan dalam menghadapi kondisi ini.

Pada tahun Oktober 2007, Departemen Kehutanan telah menerbitkan Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Gajah Sumatera dan Gajah Kalimantan 2007-2017 yang ditujukan untuk menjadi kerangka kerja terhadap berbagai program dan kegiatan konservasi gajah dan pedoman dalam melakukan konservasi gajah. Dalam rencana strategi yang disusun bersama beberapa LSM ini memuat rekomendasi antara lain menegaskan perlunya dilakukan studi status populasi dan distribusi gajah Sumatera. Populasi dan distribusi gajah diperlukan dalam merencanakan pembangunan untuk dapat menghindari dan meminimalkan konflik dengan keperluan lahan dan habitat gajah. Data ini di sisi lain diperlukan oleh pengelola konservasi dan ilmuwan untuk memberi saran dan rekomendasi apabila untuk mengambil suatu keputusan terhadap suatu masalah antara konservasi gajah dan pembangunan. Sementara itu untuk pengelolaan habitat disarankan per-

lunya kolaborasi terpadu antar pemangku kepentingan dan aktifitas pembangunan di kawasan yang merupakan habitat gajah harus dikelola dengan mengedepankan aspek konservasi Untuk itu perlu dilakukan beberapa kegiatan seperti meminimalkan kehilangan habitat dengan menghindari kegiatan pembangunan di sekitar dan dalam kawasan yang diketahui memiliki gajah dan atau merupakan daerah jelajah gajah, mensinergikan habitat dan koridor gajah dalam program tata ruang dan pembangunan nasional, provinsi serta kabupaten dan kota.

Di Provinsi Riau sendiri, kondisi habitat gajah dari tahun ke tahun semakin terdegradasi sehingga mengakibatkan jumlah populasi gajah terus menurun. Demikian juga kantong-kantong gajah semakin terfragmentasi dan terpisah-pisah sehingga menyebabkan konflik antara manusia-gajah. Menurut survei tahun 2003 diperkirakan ada sekitar 350- 400 ekor gajah yang tersebar di 15 kantong habitat gajah namun jumlah ini menurun. Berdasarkan kondisi konflik dan estimasi diperkirakan pada tahun 2006 populasi gajah di Riau berkisar 250 an ekor dan tersebar di 9 kantong habitat. Beberapa tempat yang telah menjadi kawasan lindung atau konservasi yang teridentifikasi merupakan habitat gajah telah berubah fungsi menjadi pemukiman atau perkebunan. Lihat saja kondisi Suaka Margasatwa Balai Raja di Kabupaten Bengkalis dan Hutan Lindung Mahato di Kabupaten Rokan Hulu, menurut survei yang kami lakukan, daerah ini merupakan kantong habitat gajah yang memiliki populasi yang besar tetapi pada kenyataannya kawasan tersebut sudah tidak memiliki daya dukung untuk kehidupan gajah-gajah tersebut untuk jangka panjang.

Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Gajah secara nasional sudah tersedia, tentu hal ini perlu dijabarkan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah dan diterapkan sedemikian rupa. Implementasi dari strategi dan rencana ini akan menjadi solusi terhadap permasalahan konflik manusia-gajah khususnya di Riau yang hingga kini belum dapat diatasi. Berdasarkan strategi dan rencana aksi inilah perlunya dibangun strategi konservasi gajah di Riau. (Syamsidar)



Sedikit Fakta Tentang Operasional Flying Squad

A. Flying Squad sebagai Teknik Mitigasi Konflik Manusia-Gajah

Sejak April 2004, WWF bersama dengan Balai Konservasi Sum-ber Daya Alam Riau telah mengoperasikan satu tim Flying Squad di sekitar Taman Nasional Tesso Nilo tepatnya di sekitar Desa Lubuk Kembang Bunga. Dari hasil perjalanan Flying Squad sampai stahun 2009, FS sebagai upaya mitigasi konflik terutama dalam menekan laju kerugian yang dialami masyarakat terbukti efektif dan optimal. Hal ini terlihat dari laju penurunan kerusakan lahan yang dialami masyarakat tiap tahun walaupun tingkat kedatangan gajah ke lokasi tidak menunjukkan angka penu-



Tim Flying Squad melakukan penanganan konflik manusia-gajah

runan yang signifikansi. Tidak menurunnya tingkat kedatangan gajah ke lokasi (daerah sekitar operasional Flying Squad) merupakan hal yang wajar mengingat secara alamiah bahwa gajah memiliki skala periodik untuk berkunjung ke satu lokasi. Kun-jungan gajah ke satu lokasi berkenaan dengan daerah jelajah dari clan gajah yang cenderung tetap sepanjang tahun. Meskipun demikian, dilihat dari data yang ada, waktu atau bulan puncak kedatangan gajah belum menunjukkan pola kecendrungan waktu 10 tahun untuk melihat pola kecenderungan kedatangan gajah di Lubuk Kembang Bunga.

B. Jumlah kedatangan gajah di Desa Lubuk Kembang Bunga

Dari hasil analisa data (yang dilakukan tahun 2009) terlihat bahwa frekuensi kedatangan gajah setiap tahunnya adalah fluktuatif dan polanya belum dapat diperkirakan. Pada tahun 2005 - 2006, puncak kedatangan gajah di Lubuk Kembang Bunga terjadi pada bulan Juni, Juli dan September. Tahun 2007, puncak

kedatangan gajah terjadi pada bulan April dan Januari. Pada tahun 2008, puncak kedatangan gajah terjadi pada bulan Maret dan Desember. Sementara itu ,total rata-rata kedatangan gajah tahun 2005 – 2006 adalah 41 kali, tahun 2007 sebanyak 20 kali, tahun 2008 sebanyak 20 kali.

Penurunan kedatangan gajah kemungkinan karena aktifnya kegiatan tim Flying Squad di Lubuk Kembang Bunga (LKB), sehingga terjadi penghindaran gajah liar datang kelokasi tersebut. Keadaan ini mungkin juga disebabkan pola kedatangan gajah yang acak, sehingga belum dapat dipastikan pola kedatangan gajah secara menyeluruh mengingat studi ekologi gajah di wilayah LKB sedikit dilakukan.

Menurut data tahun 2008 , kedatangan gajah pada bulan Juni, Juli dan Oktober adalah 0 (nihil). Sementara itu frekuensi kedatangan gajah dari tahun 2005-2008 pada Agustus dan Oktober adalah stabil yaitu antara 0 - 2 kali. Dari trend ini dapat disimpulkan bahwa Bulan Agustus dan Oktober merupakan bulan

terkecil jumlah kedatangan gajah. Periode ini bagi perusahaan HTI merupakan momen teraman dalam melakukan pemanenan atau penanaman bibit atau anakan.

C. Jumlah frekuensi individu gajah yang datang

Dari hasil analisa data didapat kesimpulan bahwa kedatangan gajah soliter (tunggal) adalah yang terbanyak frekuensinya. Tahun 2005 – 2006, frekuensi kedatangan gajah soliter ke LKB adalah 21 kali kedatangan dan hanya 3 kali kedatangan rombongan gajah > 10 individu. Pada tahun 2007 terdapat 9 kali gajah soliter, tahun 2008 ditemukan 14 kali kedatangan. Persentase frekuensi kedatangan gajah soliter tahun 2005 – 2008 adalah 49,4%. Sementara itu kedatangan gajah kelompok dengan ukuran 2 – 5 individu adalah 23,6%, gajah kelompok dengan ukuran 6 – 10 individu adalah 22,5 %. Sedangkan persentase untuk ukuran kedatangan gajah kelompok dengan jumlah besar dari 10 individu adalah 4,5 %.

Roadshow Konservasi Gajah di 6 Kabupaten di Riau

PROPINSI RIAU BEBERAPA PULUH TAHUN YANG LALU DIKETAHUI MEMILIKI POPULASI GAJAH (*Elephas maximus sumatranus*) YANG MELIMPAH. Blouch & Simbolon (1985) menyatakan bahwa tahun 1985, populasi gajah di Riau berjumlah 1067 - 1647 ekor di 11 kantong populasi. Ini yang terbanyak dari seluruh propinsi yang ada di Riau. Bagaimana saat ini?

Penyusutan hutan alam di Provinsi Riau saat ini terjadi secara drastis, hal ini berdampak pada makin berkurang dan terfragmentasinya habitat gajah Sumatera. Ekspansi hutan tanaman industri, perkebunan kelapa sawit, praktek illegal logging, kebakaran hutan dan maraknya pemukiman masyarakat adalah beberapa penyebab utama berkurangnya hutan alam. Dalam dua puluh tahun terakhir, tutupan hutan alam di Riau telah berkurang sekitar 75 % setiap tahunnya. Sampai akhir 2007, hutan alam tersisa di provinsi Riau adalah sekitar 2.254.188 ha atau 25 % dari jumlah luas daratan Riau. Dari 25 % ini hanya sekitar 10% nya merupakan habitat yang layak bagi gajah Sumatera, selebihnya adalah areal gambut yang tidak disukai oleh gajah.

Selain itu, dampak pengurangan habitat Gajah Sumatera oleh aktivitas manusia adalah timbulnya perebutan wilayah antara gajah dengan manusia yang berujung pada konflik. Konflik menyebabkan korban bagi kedua belah pihak dan merugikan dari sisi ekonomi masyarakat. Konflik selalu ada sepanjang tahun dimana gajah-gajah yang berada di Riau berada pada kondisi yang terancam dan tak jarang para petani membunuh gajah dengan cara meracun. Tahun 2009 tercatat dari 9 ekor gajah yang mati, 5 ekor diantaranya disebabkan oleh konflik atau gajah merusak kebun sawit masyarakat, dan 3 ekor lainnya sengaja dibunuh untuk diambil gadingnya. Sementara kematian gajah yang terakhir di akhir tahun 2009 di konsesi PT. RAPP walaupun belum menemukan bukti kuat, kematian gajah jantan tersebut bisa jadi karena motif perburuan karena gading gajah tidak ditemukan lagi pada bangkai gajah tersebut.

Strategi Konservasi Gajah

Tahun 2007, Departemen Kehutanan dan beberapa stakeholder yang terkait dengan konservasi Gajah Sumatera termasuk WWF Indonesia, membangun dan menetapkan sebuah strategi bagi konservasi gajah sumatera di Indonesia. Strategi dan rencana aksi konservasi gajah sumatera tersebut meliputi pengelolaan populasi, distribusi gajah sumatera dan habitatnya, penanganan konflik gajah dengan manusia, penanganan perburuan dan perdagangan ilegal gajah sumatera dan pengelolaan gajah captive (ex situ). Pengelolaan populasi dan distribusi dilakukan dengan kegiatan riset dan monitoring populasi dan distribusi, pengelolaan database sampai pada manajemen konservasi gajah untuk mempertahankan populasi satwa tersebut di Sumatera termasuk pengembangan konsep rehabilitasi lahan untuk habitat gajah sumatera. Penanganan konflik dilakukan meliputi pembuatan standar prosedur mitigasi yang telah ditetapkan dalam Permenhut 48 tentang pengembangan gugus

tugas dan teknik mitigasi konflik satwa liar, pembuatan jejaring mitigasi konflik di tingkat nasional sampai tingkat propinsi sampai pada mendorong banyak studi mitigasi konflik.

Di tingkat Propinsi Riau, upaya mendorong implementasi strategi konservasi gajah tengah dibangun. Salah satunya adalah pertemuan konservasi gajah di tingkat jaringan forum gajah sebagai langkah awal membangun strategi konservasi gajah sumatera di Riau. Pertemuan tersebut merumuskan dan merekomendasikan studi untuk konservasi dan mitigasi konflik dan sebagai langkah sosialisasi strategi di tingkat nasional.

Tahun 2008, Departemen Kehutanan menetapkan sebuah peraturan yaitu Permenhut no. 48 tahun 2008 yang bertujuan sebagai pedoman penanggulangan konflik satwa liar – manusia dan memberikan arahan pelaksanaan kegiatan penanggulangan konflik satwa liar – manusia sehingga dapat dilaksanakan dengan tepat, cepat, efektif dan efisien. Beberapa prinsip yang dibangun dalam permenhut ini adalah manusia dan satwa liar terutama gajah sama-sama penting, penanganan konflik di lokasi yang spesifik, penyelesaian masalahnya dilakukan secara terpadu, mitigasi konflik dilakukan dalam skala lansekap dengan memasukkan wilayah jelajah gajah dan habitat penting gajah. Yang terakhir, penanganan mitigasi konflik tidak dilakukan oleh satu institusi saja tetapi menjadi tanggung jawab multipihak karena efek dari konflik gajah dengan manusia luas meliputi banyak aspek. Multi pihak dapat mengembangkan kolaborasi atau kerjasama sehingga dapat berbagi peran secara efektif.

Roadshow Sosialisasi Konservasi Gajah dalam upaya mencari solusi

Bulan April – Juni 2009, BBKSDA, Balai TNTN, Dinas Kehutanan Kabupaten dan WWF- Indonesia melakukan survei terhadap status populasi harimau dan habitatnya di 9 kantong gajah yang tersisa di Riau; Mahato, Libo (Koto Tengah dan Balai Raja), Minas (Petapahan), Senepis, Giam Siak, Bukit Tigapuluh, Tesso Nilo, Rimbang Baling (Koto Tengah) dan Kerumutan. Survei yang dilakukan tiga bulan ini menitikberatkan pada kajian ekologi gajah secara umum terutama melihat kondisi habitatnya dan telaah konflik antara gajah dengan manusia. Metode yang digunakan adalah metode pengamatan langsung, wawancara dengan masyarakat dan FGD (Focus Group Discussion). Penggunaan SIG (Sistem Informasi Geografis) juga dilakukan untuk memantau habitat gajah terkini.

Dari hasil studi didapat estimasi dari kondisi populasi, sebaran dan habitat Gajah Sumatera terkini dan beberapa masukan



Road show strategi konservasi gajah sumatera di Kabupaten Inhu dan Pelalawan.



teknik dalam mitigasi konflik gajah – manusia disesuaikan dengan lokasinya masing-masing atau spesifikasi di tiap-tiap kantong gajah. Teknik-teknik mitigasi dan solusi terhadap konflik meliputi upaya penanganan dan mempertahankan populasi gajah di habitat yang sudah mengalami kerusakan parah atau sebagian besar hilang oleh pemukiman dan perkebunan atau lahan untuk peruntukan yang lain, strategi pengembangan flying squad atau mitigasi dan patroli konflik dengan gajah, pengembangan parit gajah dan pagar listrik (electric fencing) dan upaya pelibatan masyarakat dan semua pihak yang peduli terhadap satwa tersebut. Upaya penangkapan gajah atau dengan pembatasan breeding atau sterilisasi satu populasi juga dilakukan dengan kriteria khusus terutama apabila populasi sudah tidak bisa dipertahankan karena konflik berkepanjangan dan habitat yang sudah tidak ada atau berubah menjadi pemukiman atau kebun.

Pasca studi di sembilan kantong gajah tersebut dan sebagai upaya perwujudan dari implementasi strategi konservasi gajah tingkat nasional, sosialisasi hasil studi dan sosialisasi tentang strategi konservasi gajah sumatera tahun 2007 – 2017 Dephut termasuk Permenhut no. 48 dilakukan di enam kabupaten yang memiliki keberadaan gajah yaitu Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Bengkalis. Sampai akhir tahun 2009, sosialisasi telah dilaksanakan di empat sementara itu sosialisasi di dua kabupaten akan dilanjutkan pada

awal 2010. Roadshow bertujuan mensosialisasi kepada stakeholder terutama pemerintah kabupaten tentang kondisi gajah sumatera, dan juga untuk mendorong masukan-masukan dari kabupaten-kabupaten untuk dibawa ke dalam workshop penyusunan strategi konservasi gajah tingkat propinsi yang akan dilaksanakan pada awal 2010. Sosialisasi ini juga diharapkan menjadi langkah awal dalam mengidentifikasi gugus tugas penyelamatan gajah sumatera dan upaya mitigasi konflik di Riau.

Berbagai permasalahan utama terungkap dari hasil pertemuan tersebut yaitu permasalahan habitat gajah yang terus mengalami penurunan akibat pembukaan lahan terutama untuk kebun sawit dan konsesi HTI, tumpang tindih lahan termasuk tumpang tindih kebijakan areal konsesi dan lemahnya tindakan hukuman bagi para pelanggar lahan, penjualan lahan hutan kepada pendatang, konflik manusia -gajah di beberapa tempat termasuk opini klasik masih menempatkan gajah pada posisi yang lebih tinggi diperhatikan dibandingkan manusia dan koordinasi stakeholder yang belum kuat dalam perlindungan Gajah Sumatera.

Dari hasil pertemuan di 4 Kabupaten, beberapa solusi terekam sebagai bagian rencana ke depan dari konservasi gajah yaitu;

1. Memasukkan kantong gajah (habitat gajah) untuk di masukkan ke dalam bagian tata ruang kabupaten terutama usulan di Kabupaten Indragiri Hulu dan Kuantan Singingi.
2. Memasukkan isu kantong gajah di bentang alam Bukit Tigapuluh sebagai kantong yang dilindungi dan diper tahankan populasinya di Kabupaten Kuantan Singingi termasuk rasionalisasi manajemen di bentang alam tersebut dan hutan lindung bukit Betabuh.
3. Pembentukan gugus tugas (satgas) mitigasi konflik di tingkat daerah termasuk penguatan garis koordinasi satgas antara pemda dengan Departemen Kehutanan.
4. Studi populasi dan wilayah jelajah gajah di beberapa tempat terutama di wilayah-wilayah yang habitatnya terancam dan penuh konflik seperti di Kabupaten Kampar.
5. Mekanisme insentif bagi korban manusia atau lahan yang dirusak oleh gajah.
6. Upaya bagi Kabupaten dan Departemen Kehutanan dalam penyediaan anggaran kegiatan mitigasi konflik tersebut yang lebih terarah dan sesuai rencana strategis yang akan dibuat.
7. Meningkatkan kuantitas dan kualitas dalam memberi kan kesadaran masyarakat tentang perlindungan dan teknik-teknik mitigas kepada masyarakat umum. (Wishnu Sukmantoro)

TN. Tesso Nilo Diperluas Menjadi 83 Ribu Hektar

Perjuangan panjang untuk mewujudkan perluasan Taman Nasional Tesso Nilo akhirnya menjadi kenyataan dengan keluarnya SK Menteri Kehutanan RI Nomor 663/Menhut-II/2009 pada tanggal 15 Oktober 2009. Surat Keputusan itu menjadi dasar Perubahan Fungsi Sebagian Kawasan Hutan Produksi Terbatas Kelompok Hutan Tesso Nilo seluas ± 44.492 ha di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau menjadi Taman Nasional sebagai Perluasan Taman Nasional Tesso Nilo.

Perluasan Taman Nasional Tesso Nilo merupakan komitmen pemerintah pusat dan daerah. Pada 28 Agustus 2008 dilakukan penandatanganan kesepakatan mengenai perluasan Taman Nasional Tesso Nilo dan penanganan perambahan di kawasan Tesso Nilo antara Departemen Kehutanan, Pemerintah Provinsi Riau dan Kabupaten Pelalawan. Dalam kesepakatan tersebut dinyatakan para pihak mendukung perluasan TNTN menjadi 100.000 ha dan melakukan pencegahan dan penanganan perambahan, illegal logging, kebakaran hutan dan lahan di Tesso Nilo. Usulan perluasan TNTN tersebut meliputi konsesi HPH Nanjak Makmur seluas ± 44.492 dan Siak Raya Timber seluas ± 18.812 ha. Namun hingga akhir proses, perluasan baru dapat dilaksanakan pada kawasan eks HPH Nanjak Makmur. Sementara itu kawasan usulan perluasan TNTN yang masuk dalam HPH Nanjak Makmur akan dijadikan daerah penyangga taman nasional tersebut.

Kepala Taman Nasional Tesso Nilo, Drh. Hayani Suprahman, MSc menyatakan, "Perluasan TNTN direncanakan menjadi ± 100.000 ha namun sejauh ini baru HPH PT. Nanjak Makmur yang telah siap mendukung perluasan TNTN oleh karena itu perluasan dilaksanakan di kawasan tersebut". Hayani menambahkan, "Meskipun demikian kawasan usulan perluasan TNTN yang berada pada konsesi PT. Siak Raya Timber dapat dijadikan daerah penyangga TNTN dan pemegang konsesi tersebut berperan dalam mengamankan kawasan hutan Tesso Nilo agar kawasan tersebut dapat mengakomodasi kebutuhan habitat gajah."

Tesso Nilo merupakan salah satu blok hutan dataran rendah yang masih tersisa di Pulau Sumatera yang terletak di Provinsi Riau daratan. Pada 19 Juli 2004 sebagian hutan di blok hutan Tesso Nilo dengan luas 38.576 ha ditunjuk menjadi Taman Nasional Tesso Nilo oleh Menteri Kehutanan. Di kawasan ini terdapat dua kantong gajah yang mana daerah jelajahnya meliputi daerah yang telah ditunjuk menjadi taman nasional dan diluar taman nasional. Untuk memberikan perlindungan dan pengelolaan kawasan lebih efektif dan mencegah konflik manusia-gajah perlu dilakukan perluasan taman nasional tersebut. Oleh karena itu upaya untuk mewujudkan perluasan tersebut telah dilakukan sejak tahun 2005 dan telah mendapat dukungan dari berbagai komponen masyarakat dan pemerintah baik daerah dan pusat.

Salah satu poin dalam Surat Keputusan perluasan TNTN tersebut adalah bahwa Menteri Kehutanan memerintahkan instansi terkait untuk melakukan pengelolaan secara intensif dengan melibatkan para pihak terkait dan melakukan langkah-langkah penanganan perambahan kawasan hutan secara menyeluruh, terpadu dan terintegrasi pada kawasan hutan yang dimaksud.

Bupati Pelalawan, Rustam Effendi melepasliarkan seekor kukang di TNTN.



PADA TANGGAL 17 DESEMBER 2009, Bupati Pelalawan Rustam Effendi menggelar diskusi dengan instansi terkait di Taman Nasional Tesso Nilo guna mendapatkan masukan pengelolaan Taman Nasional Tesso Nilo. Bupati Pelalawan yang didampingi oleh anggota DPR pusat asal Provinsi Riau, Adi Sukemi bersama dengan kepala dinas terkait Pemkab Pelalawan, Kepala Balai Taman Nasional Tesso Nilo, Kepala Balai Besar Konservasi dan Sumber Daya Alam Riau, dan WWF antara lain mendiskusikan perlunya penyelesaian tata batas TNTN sebagai salah satu upaya pencegahan perambahan di kawasan tersebut, pembangunan parit gajah sebagai salah satu upaya menangani konflik manusia-gajah, potensi pengembangan ekowisata di Tesso Nilo, dll. Hasil dari diskusi ini rencananya akan disampaikan kepada pemerintah Provinsi Riau untuk dapat ditindaklanjuti.

Dalam kesempatan ini, Bupati Pelalawan melakukan pelepasliaran seekor kukang, hewan peliharaannya ke Taman Nasional Tesso Nilo. Ia berharap, kukang tersebut dapat kembali hidup liar di habitat alaminya dan berkembang biak di alam. Dengan komitmen dan dukungan nyata semua pihak untuk pelestarian Tesso Nilo, Bupati Pelalawan yakin ancaman keutuhan hutan Tesso Nilo dapat ditangani dengan baik dan kawasan tersebut dapat memberikan fungsi ekologi jangka panjang. Selain itu, masyarakat sekitar juga dapat merasakan langsung manfaat keberadaan Tesso Nilo salah satunya dengan pengembangan ekowisata yang melibatkan masyarakat sekitar.

Direktur Program Kehutanan WWF-Indonesia, Ian Kosasih menyatakan, "Kami menyambut baik perluasan ini karena ini merupakan komitmen semua pihak sebagai salah satu alternatif pemecahan masalah konflik manusia-harimau." Ia menambahkan, "WWF-Indonesia sangat mendukung himbauan Gubernur Riau agar pemerintah Provinsi Riau dan komponen masyarakat untuk mendukung langkah-langkah dalam mengatasi segala permasalahan termasuk perambahan hutan, illegal logging dan pembakaran hutan dan lahan."

Dirjen PHKA Ir. Darori MM menyatakan, "Sebagai tindak lanjut dari perluasan TNTN, penanganan perambahan di kawasan tersebut harus menjadi prioritas dan tanggung jawab bersama. "Departemen Kehutanan dan Pemerintah Daerah akan mengambil langkah-langkah strategis untuk mendukung upaya penanganan perambahan di kawasan Tesso Nilo yang tentunya akan dilaksanakan secara komprehensif." Saya juga menghimbau setiap komponen masyarakat untuk mendukung upaya ini," katanya.

Sementara itu berbagai upaya dalam melakukan penanganan perambahan di TNTN pasca keluarnya SK perluasan tersebut terus diaktifkan oleh Balai Taman Nasional Tesso Nilo sebagai pemegang otoritas di kawasan tersebut. Patroli pengamanan kawasan terus diintensifkan seperti halnya pada pertengahan November yang berhasil menangkap tangan dua pelaku penebangan liar di kawasan TNTN. Para pelaku ini kini tengah diproses untuk penegakan hukum. Semoga perluasan Taman Nasional Tesso Nilo yang dibarengi dengan penanganan permasalahan di kawasan tersebut akan mampu mewujudkan fungsi Tesso Nilo lebih optimal. (Syamsidar)

Pengamanan Taman Nasional Tesso Nilo

Pengamanan kawasan Taman Nasional Tesso Nilo terus diintensifkan oleh Tim Patroli Balai Taman Nasional Tesso Nilo dan Tim Patroli Tesso Nilo baik berupa penindakan atau pun berupa peringatan yang diberikan kepada pelaku. Ada dua kasus pelanggaran berupa kegiatan mengerjakan dan menduduki wilayah hutan hasil temuan yang disidik sepanjang tahun 2009. Proses hukum kedua kasus ini hingga kini masih bergulir.

Secara kuantitas penegakan hukum di Tesso Nilo pada dua tahun terakhir (2008-2009) terlihat menurun dibandingkan tahun 2007 dimana sepanjang tahun 2007 tersebut terdapat 26 kasus yang diproses hukum. Empat dari 26 kasus tersebut berhasil diproses hukum hingga vonis pengadilan dengan hukuman bervariasi. Sementara itu pada tahun 2008 terdapat satu kasus yang diproses hukum dan dijatuhi vonis. Penurunan angka ini bisa jadi disebabkan oleh menurunnya angka kegiatan perambahan, pembalakan liar dan kebakaran hutan di Tesso Nilo pada periode tersebut. Hal ini disebabkan dengan intensifnya kegiatan patroli rutin baik yang dilaksanakan oleh Balai Taman Nasional Tesso Nilo dan Tim Patroli Tesso Nilo.

Sosialisasi tentang komitmen pemerintah dalam upaya perluasan Taman Nasional Tesso Nilo dan penanganan perambahan, pembalakan liar dan kebakaran hutan dan lahan di Tesso Nilo telah menyadarkan para perambah akan kegiatan mereka yang melanggar hukum. Dari data tim Patroli Tesso Nilo tercatat sebagian perambah ada yang telah meninggalkan kawasan yang dirambah baik di dalam Taman Nasional Tesso Nilo maupun perluasannya. Namun demikian ada juga sejumlah lokasi perambahan baru yang muncul.

Sejak Maret 2007, Tim Patroli Tesso Nilo yang terdiri dari sepuluh institusi yaitu Balai Taman Nasional Tesso Nilo, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Riau WWF Indonesia-Program Konservasi Riau, Dinas Kehutanan Pelalawan, PT. RAPP, PT. Nanjak Makmur, PT. Hutani Sola Lestari, PT. Siak Raya Timber, Yayasan Taman Nasional Tesso Nilo, dan Forum Masyarakat Tesso Nilo telah melakukan kesepakatan untuk membentuk Tim Pencegahan dan Penanggulangan Perambahan, Illegal Logging dan Kebakaran Hutan dan Lahan di Tesso Nilo. Tugas Pokok dari tim ini (disebut Tim Tesso Nilo) adalah melakukan patroli pengamanan hutan, pemeriksaan di "check point", pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan serta melaporkan kasus terkait yang terjadi di Tesso Nilo kepada pihak terkait.

Sejak terbentuknya, tim ini telah intensif melakukan kegiatan pengamanan Taman Nasional Tesso Nilo dan usulan perluasannya. Hal ini diperkuat lagi dengan dibentuknya tim yang sama ditingkat provinsi lewat SK Gubernur Riau pada tahun 2008. Tim ini juga telah melakukan operasi gabungan dan sosialisasi kepada perambah akan komitmen pemerintah untuk perluasan dan penanganan perambahan di Tesso Nilo. Rangkaian dari proses inilah yang telah menghasilkan beberapa upaya penegakan hukum dan tindakan persuasif kepada perambah untuk memahami posisi kegiatan mereka di kawasan hutan negara tersebut.

Berdasarkan hasil survei tahun 2007 tercatat seluas 8.000 ha lahan dalam TNTN telah dirambah masyarakat lokal maupun pendatang. Sementara itu sekitar 26.000 ha kawasan hutan di



kawasan usulan perluasannya telah dirambah yang sebagian besar dilakukan oleh pemilik modal besar. Dari pengalaman patroli pengamanan hutan ini sepanjang 2007 hingga 2009, tim banyak menemukan kendala di lapangan.

Pendekatan hukum tidak selalu membuahkan hasil yang efektif dalam penanganan perambahan karena petugas sering kali mendapatkan tantangan yang nyata di lapangan, konflik dengan masyarakat tidak bisa dihindarkan. Di sisi lain dapat dipahami bahwa posisi sebagian masyarakat perambah merupakan korban dari praktek jual beli lahan di kawasan hutan Tesso Nilo. Dapat dimengerti bahwa mereka akan melakukan perlawanan untuk mempertahankan investasi yang telah mereka keluarkan di Tesso Nilo namun Tesso Nilo merupakan kawasan hutan negara yang tidak dapat dialih fungsikan kecuali ada izin pelepasan kawasan dari Menteri Kehutanan. Dengan melihat semua kondisi di atas sangat diperlukan pemutakhiran data perambahan setiap tahun agar ditemukan cara efektif penanganan perambahan di TNTN dan perluasannya. Dengan tersedianya data lengkap, terkini dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi dasar bagi pengambil kebijakan untuk mengambil langkah penanganan perambahan di Tesso Nilo dengan lebih komprehensif. Untuk itu Balai Taman Nasional Tesso Nilo dan WWF melakukan pemutakhiran data perambahan baik di dalam TNTN maupun kawasan perluasannya dari awal hingga akhir Desember lalu. Pemutakhiran data perambahan ini bertujuan antara lain untuk mengumpulkan data kepemilikan lahan dan legalitasnya, bentuk pemanfaatan lahan. Hasil pemutakhiran data ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan luasan perambahan di dalam TNTN dan perluasannya meskipun dalam jumlah kecil.

Keluarnya SK Perluasan Taman Nasional Tesso Nilo harus menjadi langkah untuk penyelesaian perambahan di kawasan tersebut. Upaya-upaya nyata untuk menghindari terjadinya perambahan tersebut juga harus disegerakan seperti tata batas kawasan baik taman nasional yang sudah ada maupun kawasan perluasannya. Ketidakjelasan batas fisik taman nasional tersebut selama ini menjadi salah satu alasan mengapa perambahan terjadi di kawasan tersebut. Penegakan hukum terhadap aktor penyebab terjadinya perambahan di Tesso Nilo, penyelesaian konflik lahan merupakan agenda yang harus diselesaikan untuk menangani perambahan di Tesso Nilo. (Syamsidar)

Harimau Sumatera, Ancaman Menuju Kepunahan yang Memilukan

SEBAGAI BAGIAN DARI PUSAT BIODIVERSITAS

tertinggi dan penting di dunia, Indonesia memiliki kekhasan flora dan fauna yang sangat beraneka ragam dan terbagi dalam 3 tipe penyebaran genetik berdasarkan geo-evolusi. Tiga tipe tersebut yaitu flora fauna di wilayah barat Indonesia yang dibatasi paparan Sunda besar (Sunda Land), kemudian wilayah timur yang dibatasi paparan Sahul dan wilayah peralihan di wilayah Sulawesi dan sekitarnya. Dari tipe penyebaran genetik tersebut, flora fauna di Indonesia banyak memiliki kekhasan karena tidak ditemukan di wilayah lain di seluruh dunia. Salah satunya adalah harimau. Meskipun masih dipengaruhi garis genetik harimau di wilayah Asia, harimau merupakan spesies khas dan memiliki ciri-ciri spesifik di Indonesia

Dalam sejarahnya, Indonesia memiliki tiga sub spesies harimau (*Panthera tigris*) dari 9 sub spesies yang ada di dunia. Tiga subspecies harimau dunia telah dikategorikan punah di alam dan dua subspecies diantaranya terdapat di Indonesia yaitu harimau Bali (P.t. *balica*) punah tahun 1930-an dan harimau Jawa (P.t. *sondaica*) punah tahun 1980-an (Ramono & Santiapillai 1994; Seidensticker et al. 1999 dalam Sunarto 2004). Harimau sumatera (P.t. *sumatrae*) merupakan satu-satunya subspecies harimau yang masih bertahan hidup di Indonesia. IUCN (2006) telah mengategorikan harimau sumatera dalam status “critically endangered” atau satwa langka yang kritis yaitu kategori tertinggi dari ancaman kepunahan. Di Indonesia, pemerintah telah melindungi harimau sumatera yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah nomor 7 dan 8 tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa. Hingga saat ini, harimau sumatera masih diambang kepunahan akibat ancaman yang tinggi setiap waktu. Kehilangan habitat akibat konversi hutan untuk berbagai kepentingan masih saja terjadi pada kawasan penyebarannya (Ramono & Santiapillai 1994; Kinnaird et al. 2003). Holmes (2002) menyatakan bahwa hutan Sumatera telah hilang secara luas dalam dua dekade terakhir. Perburuan harimau sumatera untuk perdagangan bagian-bagian tubuhnya (Plowden & Blowes 1997; Sheperd & Magnus 2004 dalam Sunarto 2004) dan perburuan dengan alasan pencegahan konflik harimau dan manusia (Nyhus & Tilson 2004) mengakibatkan menurunnya kepadatan populasi dan sebarannya di alam.

Hasil penilaian PHVA (Population and Habitat Viability Assessment) tahun 1992 melaporkan bahwa penyebaran populasi harimau sumatera hanya terdapat pada 26 kawasan konservasi dan kawasan hutan lainnya yang terpisah secara geografis yang mana jumlah populasi di alam diperkirakan tinggal 400-500 ekor. Akan



tetapi saat ini, angka populasi tersebut dipastikan semakin berkurang bila ditinjau dari berbagai laporan penelitian dan sumber informasi lainnya yang mencatat adanya perburuan terhadap harimau sumatera di beberapa provinsi di Sumatera. Penyebaran populasi harimau sumatera masih belum sepenuhnya teridentifikasi dengan akurat. Masih banyak kawasan-kawasan hutan yang belum disurvei untuk mengidentifikasi status penyebarannya. Wikramayake et al. (1998) mengidentifikasi daerah-daerah penting penyebaran harimau sumatera, salah satu daerah tersebut adalah Lansekap Tesso Nilo-Bukit Tigapuluh di Riau yang mencakup kawasan hutan Taman Nasional Tesso Nilo, Suaka Margasatwa Rimbang Baling, Suaka Margasatwa Kerumutan dan Taman Nasional Bukit Tigapuluh dan sekitarnya. Lansekap ini mencakup luasan sekitar 2,7 juta hektar dan diharapkan dapat mendukung pelestarian populasi harimau sumatera dan mangsanya di alam.

Mengapa Harimau Sumatera Penting?

Pertanyaan ini sering muncul dimana-mana tentang pentingnya harimau terutama bagi manusia. Dalam sejarahnya, harimau merupakan spesies penting sebagai komponen di dalam kehidupan. Harimau dianggap sebagai predator yang efektif dan bertahan hidup sejak jaman prasejarah dibandingkan jenis-jenis lain yang tubuhnya lebih besar misalnya dari spesies prasejarah *Tyrannosaurus* (Ty-rex). Oleh karena itu kepentingannya sebagai penyeimbang populasi spesies tertentu sangat signifikan dan penting. Populasi-populasi tertentu dapat dikendalikan (sehingga tidak membludak) oleh adanya predator ini. Bagi manusia tentu sangat penting terutama membantu dalam pengendalian hama misalnya babi hutan dan primata. Keberadaan harimau

menyebabkan populasi babi hutan, primata (misalnya monyet) dan berbagai jenis hama lainnya bagi pertanian dapat terkontrol dan terbatas populasinya. Seringkali manusia membandingkan dari sisi manfaat atau keuntungan ekonomi secara langsung dari harimau sehingga sulit memperkirakan secara jelas manfaat dari spesies ini.

Coba bayangkan kalau Anda memiliki satu lahan pertanian atau kebun kemudian kebun atau lahan pertanian Anda diserang hama babi yang begitu besar karena tidak ada pengontrol populasi hama seperti harimau. Kebun dan lahan pertanian Anda tentu mengalami kerusakan atau Anda mengalokasikan sejumlah biaya untuk melakukan perburuan atau membuat pagar yang luas. Keuntungan Anda dikurangi kerugian atau biaya yang Anda keluarkan tentu akan memperkecil pendapatan Anda dari kebun atau pertanian. Dengan keberadaan harimau atau predator, kerugian atau biaya yang dikeluarkan akan diminimalisir.

Sebagai salah satu spesies yang eksotik atau khas, harimau sumatera merupakan spesies kebanggaan nasional sehingga ketetapan harimau sumatera menjadi satwa yang dilindungi secara nasional sangat beralasan. Di banyak tempat di seluruh dunia, harimau diambang kepunahan yang dasyat tetapi di beberapa tempat lain, sudah mulai tumbuh kesadaran untuk memproteksi satwa ini dengan sangat ketat sehingga pertumbuhan populasi dapat pulih. Di Pulau Sumatera, Harimau Sumatera masuk kategori penurunan populasi yang dahsyat sehingga diperkirakan lima belas sampai dua puluh tahun ke depan mungkin akan punah mengikuti Harimau Bali dan Harimau Jawa. Pemberian nama seperti Harimau Siliwangi misalnya sudah tidak relevan lagi di Jawa Barat, begitu pula apabila pemberian logo harimau di wilayah Sumatera di saat Harimau Sumatera punah, mengingat tidak ada kebanggaan lagi bahwa Indonesia atau Sumatera memiliki satwa kharismatik ini.

Beberapa spesies dianggap sebagai penentu kerusakan lingkungan atau disebut sebagai spesies indikator, salah satunya adalah Harimau Sumatera. Di hutan-hutan Sumatera yang masih baik, keberadaan populasi Harimau Sumatera masih baik atau populasinya di satu tempat masih cukup banyak dan mengalami perkembangan biakan yang optimal (apabila tidak diburu). Hutan – hutan yang baik (tidak mengalami kerusakan dan perburuan satwa), selain populasi harimau optimal, tidak ada kecenderungan harimau menyerang manusia (konflik harimau-manusia) karena populasi yang dimangsa harimau tersedia. Dengan adanya penurunan populasi harimau yang tajam dan konflik harimau dengan manusia tinggi menandakan kawasan tersebut mengalami kerusakan lingkungan dan hutan secara signifikan. Semakin tinggi penurunan populasi baik karena perburuan atau konflik dengan manusia, kerusakan hutan dan lingkungan semakin tinggi.

Di seluruh Sumatera tak terkecuali Propinsi Riau terjadi kerusakan hutan dan lingkungan yang tinggi, hal ini menandakan pengelolaan sumber daya alam yang tidak beres. Hutan-hutan alam yang notabene hutan konservasi (hutan lindung) dikonversi oleh masyarakat dan perusahaan, atau hutan alam yang seharusnya diproteksi dikonversi. Situasi ini menyebabkan populasi harimau turun drastis akibat tidak ada makanan atau harimau menyerang manusia. Kondisi ini diperparah oleh perburuan satwa mangsa (termasuk perburuan harimau sendiri) yang mengurangi makanan harimau. Semakin tinggi perburuan satwa, semakin tinggi pula konflik harimau dengan manusia karena makanannya yang kurang tersedia di alam.

DAMPAK PERBURUAN HARIMAU

Perburuan harimau sumatera memberikan dampak yang besar antara lain;

- Secara ekologis adalah memutus mata rantai makanan yaitu meniadakan predator di alam. Dampak dari kekurangan predator di alam adalah membludaknya populasi hewan mangsa yang perkembangbiakannya tinggi seperti babi hutan. Kepunahan harimau di alam menyebabkan perubahan rantai makanan di alam termasuk ketidakadaan predator. Di Jawa, predator sekelas Harimau Jawa yang telah punah, saat ini dipegang oleh macan kumbang dan macan tutul (*Panthera pardus* spp.). Di Sumatera, jenis ini tidak tersebar, tetapi mungkin dipegang oleh macan dahan atau kucing emas yang kondisi populasinya juga hampir sama dengan Harimau Sumatera.
- Secara ekologis perburuan harimau menyebabkan perkembangbiakan Harimau Sumatera terganggu. Mengingat harimau cenderung soliter dan periode perkembangbiakannya pada waktu-waktu tertentu, satu individu harimau yang diburu atau mati di alam menyebabkan jantan atau betina yang sedang mencari pasangan dan dalam masa birahi akan kesulitan mencari pasangan yang sepadan. Perkembangbiakan harimau sumatera terganggu menyebabkan pertumbuhan populasi pun otomatis akan terganggu. Dampak perburuan selain menurunkan populasi harimau secara langsung, juga menghambat pertumbuhan populasi harimau secara signifikan.
- Secara nasional, masih adanya perburuan harimau di alam dan penurunan populasi harimau akibat kerusakan habitat menunjukkan kegagalan negara dan komitmen bangsa dalam melindungi satwa eksotik ini di alam. Kegagalan ini berdampak pada kegagalan melindungi alam dan lingkungan sebagai bagian dari ciptaan Tuhan. Kebanggaan nasional karena Indonesia memiliki satwa harimau akan hilang saat populasi harimau sumatera hilang di alam. Secara Internasional, kesepakatan dan konsistensi Indonesia dalam perlindungan satwa harimau tercoreng mengingat komitmen tersebut selalu dinyatakan dalam berbagai pertemuan dan konferensi di tingkat internasional. Dampak ini juga menurunkan Indonesia sebagai negara yang dalam mengelola sumber daya alam secara baik dan melindungi hutan dan satwa liar secara optimal. Seperti diketahui, propinsi yang mendapat sorotan penting kerusakan lingkungan yang paling tinggi secara nasional dan internasional adalah Kalimantan Tengah dan Riau.
- Secara umum meningkatkan konflik harimau dengan manusia. Di wilayahdimana tingkat perburuan harimau dan satwa liar lain tinggi, tingkat serangan harimau terhadap manusia dan ternak semakin tinggi karena secara psikologis menciptakan keterancaman hidup bagi harimau dan menurunkan populasi makanan harimau di alam.
- Melanggengkan perburuan satwa liar yang menguras sumber daya alam di Indonesia. Dengan terjadinya perburuan harimau yang terus menerus berlangsung, perdagangan internasional harimau akan tetap berlangsung pula mengingat konsumen harimau banyak pula dari negara-negara lain di dunia. Perburuan satwa liar jelas menguras kekayaan alam di Indonesia dan merugikan Indonesia sendiri di masa datang. (Wisnu Sukmantoro)



Video Jebak WWF Untuk Pertama Kalinya Rekam Gambar Induk dan Anak Harimau Sumatera

SEBUAH INDIKASI BERKEMBANG BIAKNYA SATWA LANGKA TERSEBUT, sekaligus menunjukkan semakin mendesakunya upaya perlindungan habitatnya.

Untuk pertamakalinya video jebak (*video trap*) yang di pasang oleh tim riset WWF-Indonesia di Sumatera Bagian Tengah – tepatnya diantara dua wilayah konservasi Suaka Margasatwa Rimbang Baling dan Taman Nasional Bukit Tigapuluh di Propinsi Riau dan Jambi -- berhasil merekam gambar harimau betina dan dua anaknya. Temuan ini memberikan informasi ilmiah dan unik tmengenai tingkah laku satwa dilindungi tersebut.

Setelah beroperasi selama satu bulan, kamera video otomatis bersensor mendokumentasikan foto keluarga harimau Sumatera saat mereka berjalan melintasi dan mengendus video jebak tersebut. Saat ini diperkirakan hanya terdapat sekitar 400 individu Harimau Sumatra di alam liar dengan status kritis terancam punah (*critically endangered*) dimana keberadaan mereka terus terancam oleh rusaknya habitat, dan perdagangan serta perburuan ilegal.

Setelah lima tahun penelitian harimau menggunakan kamera jebak (camera trap) yang menghasilkan gambar tak bergerak, pada September 2009 WWF mulai menggunakan video jebak (video trap) untuk melengkapi temuan-temuan sebelumnya. Hasilnya, pada Oktober 2009 untuk pertama kalinya di kawasan tersebut induk harimau beserta anaknya dapat didokumentasikan dengan video jebak saat berada di alam.



Harimau induk dan anak bersama-sama merupakan hasil yang didapat untuk pertama kalinya pada studi yang dilaksanakan oleh WWF bekerja sama dengan PHKA sejak akhir 2004. (foto atas)

Anak harimau sumatera, akankah ia mampu bertahan dari ancaman? (foto kiri)

“Memperoleh cuplikan video tersebut hanya dalam jangka waktu satu bulan setelah pemasangan kamera video merupakan suntikan moral yang sangat berarti bagi tim kami di lapangan,” jelas Karmila Parakkasi, koordinator Tim Riset Harimau Sumatera WWF-Indonesia. “Walaupun demikian, kami merasa khawatir karena hutan di kawasan tempat kami memperoleh video serta foto harimau tersebut terancam oleh pembukaan lahan oleh dua perusahaan pulp dan kertas raksasa, perkebunan kelapa sawit, serta perambahan dan penebangan liar. Yang menjadi pertanyaan, bisakah anak-anak harimau tersebut tumbuh besar di lingkungan seperti ini?,” kata Karmila

Temuan video ini didapatkan hampir berdekatan waktunya dengan peluncuran kampanye Year of Tiger yang akan dimulai secara serentak secara global pada 14 Februari 2010, yaitu bersamaan dengan dimulainya tahun Harimau dalam kalender penanggalan Cina (Imlek). Kampanye ini akan dilaksanakan di sejumlah Negara, termasuk Indonesia, yang merupakan daerah sebaran harimau untuk meningkatkan kesadaran mengenai konservasi harimau. Selain juga untukmendorong komitmen politis perlindungan harimau dari para Kepala Negara yang hadir dalam pertemuan tingkat tinggi “Tiger Summit” bulan September mendatang di Vladivostok,Russia yang akan dituanrumahi oleh Perdana Menteri Russia Vladimir Putin dan didukung oleh WWF dan sejumlah mitra lainnya yang tergabung dalam the Global Tiger Initiative.

Spesies harimau diseluruh dunia saat ini hanya tersisa 3200 ekor yang meliputi enam sub-spesies yaitu harimau Sumatera, Bengal, Amur, Indochina, Cina Selatan, dan Malaya. Tahun Harimau kali ini bisa saja merupakan kesempatan terakhir kita untuk menyelamatkan harimau jika tidak ada upaya serius dalam menyelamatkan spesies karismatik ini. Dukungan skala besar dari berbagai pihak dibutuhkan untuk pelestariannya.

Selain mendapatkan gambar harimau betina dan dua anaknya, video jebak yang dipasang tersebut juga mendapatkan gambar harimau jantan dan satwa burunya yaitu babi hutan dan rusa, dan satwa lainnya seperti tapir, monyet ekor panjang, landak, dan luwak.

Video jebak bekerja dengan sensor infra merah yang otomatis teraktifasi saat sensor tersebut mengidentifikasi panas tubuh yang melintasinya. Piranti ini menjadi alat yang sangat penting dalam upaya mengidentifikasi individu harimau guna memonitor populasi serta habitat dan wilayah jelajahnya.

“Ada tantangan tersendiri dalam mengoperasikan kamera-kamera ini, di satu sisi kita harus memasangnya di lokasi yang biasanya dilewati satwa, namun di sisi lain kita juga harus melindungi kamera tersebut dari kemungkinan dicuri oleh pembalak dan pemburu liar.” lanjut Karmila.

Karmila dan tim risetnya pertamakali memperoleh foto induk dan kedua anak harimau tersebut pada Juli 2009 dengan menggunakan kamera jebak biasa (tidak bergerak). Sayangnya gambar yang didapat tidak terlalu baik kualitasnya. “Kami tidak terlalu yakin dengan jumlah anak harimau yang terdokumentasi dalam foto-foto tersebut,”ujarnya. Untuk mengkonfirmasi hasil awal yang diperoleh, video jebak dipasang pada bulan September di lokasi yang sama.

Tim Riset Harimau WWF sejauh ini telah memasang empat kamera video jebak di kawasan jelajah harimau yaitu di antara dua wilayah konservasi Suaka Margasatwa Rimbang Baling dan Taman Nasional Bukit Tigapuluh. Kawasan ini merupakan koridor satwa atau hutan yang bersambungan yang memungkinkan perpindahan satwa dari satu tempat ke tempat yang lain. Hanya saja beberapa bagian di wilayah tersebut sudah atau akan dialihfungsikan oleh perusahaan pulp & kertas. Pembukaan hutan alam tersebut akan mempengaruhi kelestarian harimau di wilayah tersebut.

“Tak lama lagi, saat anak harimau ini cukup dewasa untuk lepas dari induknya, maka ia akan membutuhkan wilayahnya sendiri. Tapi kemana anak harimau ini akan pergi?” ujar Ian Kosasih, Direktur Program Kehutanan dan Spesies WWF-Indonesia. “Dengan menyusutnya habitat harimau akibat alih fungsi hutan, harimau akan semakin sulit menghindari kontak langsungdengan manusia. Hal ini tentu saja akan sangat membahayakan bagi keduanya.”

“Dengan adanya bukti ilmiah mengenai keberadaan harimau ini, WWF menghimbau agar daerah antara Rimbang Baling dan Bukit Tigapuluh didedikasikan sebagai koridor satwa yang dikelola secara baik dengan menerapkan praktik-praktik berkelanjutan,” lanjut Ian Kosasih.

WWF juga meminta perusahaan pulp dan kertas—Sinar Mas/APP dan APRIL—serta perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di daerah tersebut untuk melindungi hutan bernilai konservasi tinggi yang diidentifikasi sebagai habitat alami harimau dan satwa langka lainnya. Para pelaku industri tersebut harus menghentikan pembabatan hutan dan pembangunan jalan di daerah yang merupakan habitat alami satwa langka karena akan mempermudah akses bagi para pemburu dan perambah liar.

Saat ini WWF-Indonesia bekerja bersama dengan pemerintah pusat dan provinsi dalam merumuskan wilayah prioritas restorasi serta mengimplementasikan tata ruang yang mendukung pembangunan secara lestari serta menjamin perlindungan terhadap hutan alam yang masih tersisa—untuk memberikan wilayah jelajah bagi harimau Sumatera yang diharapkan akan meminimalisir kemungkinan konflik dengan manusia. (Rilis)

Madu Sialang Menuju Sertifikasi Produk Organik

MADU SIALANG BANYAK TERDAPAT DI KAWASAN HUTAN TESSO NILO dan kawasan perladangan masyarakat di sekitarnya. Lebah-lebah hutan bersarang pada pohon-pohon tertentu yang oleh masyarakat biasa disebut pohon sialang. Keberadaan pohon sialang telah lama menjadi salah satu sumber perekonomian masyarakat lewat madu-madu yang dihasilkan oleh lebah-lebah tersebut. Masyarakat sekitar Tesso Nilo telah lama memiliki kearifan untuk menjaga kelestarian hutan dimana pohon sialang bersarang. Masyarakat menyakini jika hutan kepungan atau hutan di sekitar pohon sialang rusak maka lebah-lebah tidak lagi akan menghasilkan madu yang banyak yang berarti akan memberikan dampak pada perekonomian masyarakat khususnya petani madu hutan.

Masyarakat sekitar Tesso Nilo telah lama memiliki aturan-aturan informal untuk menjaga kelestarian pohon sialang dan hutan kepungannya. Ketersediaan madu hutan Tesso Nilo sangat potensial namun kerusakan habitat di kawasan hutan Tesso Nilo mengancam kelestarian pohon-pohon sialang tersebut. WWF bekerjasama dengan masyarakat telah memutakhirkan pendataan pohon sialang di hutan Tesso Nilo dan hutan perladangan masyarakat di sekitarnya. Sepanjang tahun 2009 telah terdata 171 pohon sialang disekitar Tesso Nilo yang dibagi ke dalam empat blok peregristrasian yaitu Blok Langgam, Blok Logas-Baserah, Blok Kampar Kiri dan Blok Ukui.

Satu pohon sialang dapat disarangi oleh lebah liar sekitar 30-80 sarang yang dapat dipanen tiga kali dalam setahun dengan hasil rata-rata per panen sekitar 250-300 kg madu. Di tingkat petani atau prodused harga per kilogram madu sekitar Rp.20.000. Produksi madu yang cukup menjanjikan ini jika tidak dikelola dengan baik tidak akan dapat memberikan kontinuitas produksi dan keuntungan maksimal bagi petani madu.

Sebagai salah satu upaya untuk mengembangkan potensi madu sialang secara lestari WWF bersama dengan Forum Masyarakat Tesso Nilo melakukan pendampingan kelompok tani pengelola madu hutan Tesso Nilo mulai dari proses panen hingga pemasaran. Jaminan mutu, kapasitas produksi yang terjaga merupakan persyaratan pasar yang harus dipenuhi namun hal ini sangat sulit untuk dipenuhi oleh petani kecil. Untuk lebih meningkatkan pengelolaan madu hutan Tesso Nilo, WWF bersama Balai Taman Nasional Tesso Nilo memberikan Pelatihan Pengembangan Sistem Pengawasan Mutu Internal Untuk Sertifikasi Kelompok Usaha Madu Hutan di Tesso Nilo. Pelatihan yang diberikan oleh Aliansi Organisme Indonesia (AOI) berlangsung dari 14 sampai 17 Oktober tersebut dan bertempat di Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui-Kabupaten Pelalawan. Kegiatan ini diikuti oleh 24 peserta dari empat desa di sekitar Tesso Nilo yang terdiri dari pemilik pohon sialang, pemanjat pohon sialang dan pengumpul madu hutan.



Lebah hutan dapat membuat sarang antara 30-80 sarang pada satu pohon sialang

Untuk memenuhi persyaratan agar madu Tesso Nilo dapat bersaing di pasar, kelompok-kelompok usaha madu Tesso Nilo perlu berorganisasi untuk mengelola usahanya dengan baik dalam rangka mencapai standarisasi produk. Selama ini sistem panen madu pada beberapa masyarakat Tesso Nilo masih ada yang menggunakan peras tangan. Panen madu dengan cara ini dapat membuat kualitas madu menjadi rendah karena ketidak higienisan produk madu yang dihasilkan. Sementara itu sebagian besar madu yang berasal dari pohon tinggi dipanen dengan mengambil semua bagian sarang sehingga disamping kualitas madunya menurun karena anak-anak lebah tercampur pada madu yang dipanen, keberlanjutan populasi lebah yang akan kembali membuat sarang pada pohon tersebut pun akan berkurang.

Pelatihan Pengembangan Sistem Pengawasan Mutu Internal Untuk Sertifikasi Kelompok Usaha Madu Hutan ini bertujuan antara lain:

1. Membangun pemahaman dan harapan yang sama mengenai sistem pengawasan mutu di kelompok produsen.
2. Membangun sistem pengawasan mutu di kelompok produsen yang efektif dan benar disesuaikan dengan kondisi lokal.

3. Membangun manajemen produksi dan pemasaran yang dibangun bersama dalam kelompok produsen.
4. Membangun kapasitas bersama dalam kelompok produsen untuk memperoleh sertifikasi sistem pangan organik yang berbasis kelompok produsen.
5. Memahami kondisi, standar dan regulasi pasar produk organik dan ramah lingkungan sehingga dapat memberikan informasi yang memadai untuk memilih pasar yang ingin dimasuki.

Pertanian organik menekankan pada setidaknya empat aspek yaitu ekologi/lingkungan, kesehatan, keadilan dan perlindungan. Untuk memenuhi standar produk organik diperlukan pengawasan oleh anggota kelompok usaha madu Tesso Nilo untuk memastikan bahwa tiap tahapan dari proses pengelolaan madu tersebut dilaksanakan secara higienis dan ramah lingkungan. Sistem pengawasan seperti ini dikenal dengan Internal Control System atau Sistem Pengawasan Internal. Pada pelatihan ini, peserta merumuskan panduan Sistem Pengawasan Mutu Internal (SPMI) yang disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat dengan standar dan regulasi yang mengatur perdagangan produk ramah lingkungan termasuk produk organik. SPMI ini juga memasukkan sanksi yang diambil oleh organisasi kelompok usaha madu jika prosedur standar yang sudah disepakati tidak dijalankan.

Selain telah menyusun panduan SPMI, struktur organisasi SPMI Tesso Nilo juga telah terbentuk lewat pelatihan ini dimana peserta bersepakat untuk mengangkat staf WWF untuk menjadi koordinator. Koordinator SPMI bertugas memastikan bahwa SPMI diterapkan oleh kelompok usaha madu Tesso Nilo. Pemegang jabatan ini mengelola kegiatan penyuluhan dan pengawasan internal, memastikan bahwa anggota kelompok usaha memiliki semua sumber daya untuk melakukan pengawasan, memastikan bahwa semua petani sudah diawasi dan petani baru sudah terdaftar dengan baik. Koordinator ini juga akan menkoordinasi semua aspek kepada lembaga sertifikasi. Setelah pelatihan ini, kelompok usaha madu Tesso Nilo di empat desa dampingan tersebut akan terus didampingi untuk dapat menerapkan sistem pengawasan mutu madu-madu yang dihasilkan dari hutan Tesso Nilo. Aliansi Organisme Indonesia sebagai fasilitator dari pengembangan sistem pengawasan mutu internal madu hutan Tesso Nilo akan melakukan supervisi terhadap penerapan SPMI tersebut untuk kemudian akan diajukan menjadi produk bersertifikasi organik dari Bio Cert.

BIOCert Indonesia selanjutnya disebutkan dengan BIOCert adalah lembaga sertifikasi dan inspeksi produk pertanian organik, ramah lingkungan dan ramah sosial. BIOCert telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional [KAN] dan telah diverifikasi oleh Otoritas Kompeten Pertanian Organik [OKPO] Departemen Pertanian RI sebagai lembaga sertifikasi pangan organik yang kompeten berdasarkan Pedoman KAN 901-2006 tentang Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Pangan Organik [ISO 65] (sumber internet)

Dengan pendampingan dan semangat para petani madu di Tesso Nilo sertifikasi organik tersebut akan bisa didapatkan sehingga nilai jual madu Tesso Nilo akan semakin bersaing. Pendapatan masyarakat khususnya petani madu akan terjaga tentu saja harus dibarengi dengan perlindungan pohon-pohon sialang dan habitatnya agar kegiatan pengelolaan madu ini dapat berlangsung untuk jangka waktu panjang. (Syamsidar)

Pelatihan Fotografi di Taman Nasional Tesso Nilo

ANAK ANAK MEMILIKI SENSIFITAS sendiri terhadap lingkungan sekitarnya yang dapat dituangkan lewat berbagai media diantaranya lewat fotografi. WWF-Indonesia bekerjasama dengan WWF-Jepang dan Wonder Eyes mencoba menjembatani sensitifitas anak-anak tersebut lewat kegiatan pelatihan fotografi yang dilaksanakan di Taman Nasional Tesso Nilo pada 28-31 Oktober 2009. Sebanyak 58 orang siswa perwakilan dari SD hingga SMA yang ada di sekitar Taman Nasional Tesso Nilo dan Pekanbaru mengikuti pelatihan tersebut.

Pelatihan hari pertama menggunakan kamera instan (kamera sekali pakai), pada kesempatan ini, anak-anak diberikan instruksi menggunakan kamera instan dan bagaimana memotret objek-objek yang ada di sekitarnya. Kamera tersebut kemudian dibagikan ke peserta untuk dapat memotret aktifitas di sekitar tempat tinggal mereka. Di hari kedua para siswa diperkenalkan dengan cara penggunaan kamera digital. Hikaru Nagatake demikian nama wanita Jepang paruh baya ini yang telah 20 an tahun menggeluti dunia fotografi dengan sabar memberikan instruksi pemakaian kamera digital dan bagaimana mengambil objek bidikan. Para peserta kemudian menuju kawasan Taman Nasional Tesso Nilo untuk mengekspresikan kejelian mata mereka menangkap objek. Para siswa dari SD hingga SMA ini terlihat antusias mencari objek di sekitar taman nasional tersebut, kantung semar, embun di rerumputan, hutan yang terbuka, sungai, kupu-kupu beberapa objek yang menjadi bidikan para peserta.

Sekembalinya ke camp Flying Squad, para peserta memilih salah satu dari hasil bidikannya untuk dicetak pada kartu pos. Kartu-kartu pos yang memuat foto-foto yang dihasilkan siswa-siswa ini akan dikirim ke para siswa di Jepang sebagai balasan dari kartu pos yang telah dikirim sebelumnya ke Indonesia.

Kegiatan ini juga didukung oleh dua orang suporter kehormatan WWF-Indonesia yaitu Nugie dan Davina Hariadi. Kedua selebritis ini pun tidak sungkan-sungkan berbaur mendampingi para siswa mengarahkan kamera ke objek bidikan. Di sela-sela kegiatan fotografi tersebut, tidak ketinggalan Nugie dan Davina pun mencoba merasakan langsung kegiatan-kegiatan lapangan WWF seperti pemasangan camera trap (kameraintai) dan patroli dengan gajah di sekitar Tesso Nilo bersama dengan Tim Flying Squad.

Kegiatan pelatihan fotografi ini dilaksanakan di dua lokasi di Sumatera yaitu di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan-Lampung dan Taman Nasional Tesso Nilo- Riau. Semua foto yang dihasilkan oleh anak-anak dalam kegiatan ini rencananya akan dipamerkan di Indonesia & Jepang sebagai upaya membangun pemahaman dan pertukaran kebudayaan antar generasi. (Syamsidar)



Para peserta memamerkan pilihan foto hasil bidikannya yang telah dicetak menjadi kartu pos (foto atas)

Penanaman 3.600 Bibit Menandai Dimulainya Restorasi TN. Tesso Nilo

PADA TANGGAL 5 DESEMBER 2009, sebanyak 120 siswa-siswi melaksanakan penanaman 3.600 pohon di Taman Nasional Tesso Nilo. Penanaman pohon yang terdiri dari sepuluh jenis tumbuhan asli hutan tersebut merupakan upaya awal restorasi di Taman Nasional Tesso Nilo selain untuk mendukung gerakan menanam pohon Indonesia. Kegiatan kerjasama Balai Taman Nasional Tesso Nilo dan WWF-Indonesia Program Riau dibuka secara langsung oleh Bupati Kabupaten Pelalawan, Rustam Effendi yang didampingi Ketua DPRD Pelalawan, Agustiar dan unsur Muspida Kabupaten Pelalawan.

Bupati Pelalawan dan Ketua DPRD Pelalawan disambut dengan pengalungan bunga oleh Ria, salah seekor gajah tim Flying Squad (Tim Pengusir Gajah Liar) sesampainya di Taman Nasional Tesso Nilo. Bupati dan rombongan kemudian melanjutkan perjalanan dengan menggunakan sepeda motor ke lokasi penanaman yang berjarak ± 1 km dari akses terakhir. Di lokasi penanaman dilakukan upacara singkat dimana Kepala Balai Taman Nasional Tesso Nilo, Drh. Hayani Suprahman, MSc menyerahkan bibit kepada Bupati Pelalawan yang menandai dimulainya restorasi di taman nasional tersebut.

Kepala Balai Taman Nasional Tesso Nilo, Drh. Hayani Suprahman, MSc menyatakan; "Kegiatan menanam pohon di Taman Nasional Tesso Nilo ini merupakan langkah awal untuk merestorasi Taman Nasional Tesso Nilo dari ancaman yang mengganggu keutuhan taman nasional tersebut dan turut mensukseskan Gerakan Menanam Pohon Indonesia". Ia menambahkan, "Rehabilitasi Taman Nasional Tesso Nilo merupakan bagian dari rencana pengelolaan taman nasional tersebut untuk itu diperlukan dukungan dari stakeholder terkait agar dapat berjalan optimal."

Dalam sambutannya, Bupati Pelalawan menyatakan, "Saya menyambut baik kegiatan penanaman di Taman Nasional Tesso Nilo dan berharap kegiatan seperti ini akan lebih banyak lagi dilaksanakan". Ia menambahkan bahwa sudah saatnya upaya restorasi dilaksanakan karena di kawasan hutan kita sebagian kayu-kayunya telah hilang akibat praktek illegal. Ia menekankan bahwa apa yang kita lakukan hari ini akan menentukan masa depan oleh karena itu kegiatan yang dilaksanakan di Tesso Nilo hari ini merupakan upaya nyata untuk melindungi Tesso Nilo apalagi Tesso Nilo merupakan aset Kabupaten Pelalawan.

Keterlibatan langsung generasi muda dalam upaya nyata merestorasi Taman Nasional Tesso Nilo adalah hal yang sangat membanggakan. Kegiatan penanaman pohon ini merupakan rangkaian dari kegiatan pendidikan lingkungan hidup dan pengenalan Taman Nasional Tesso Nilo yang melibatkan siswa-siswi dari 6 SLTA di Pekanbaru dan 2 SLTA di Kabupaten Pelalawan. Pada Mei lalu sebanyak 104 siswa-siswi perwakilan dari delapan SLTA tersebut melaksanakan kegiatan pembibitan tumbuhan asli hutan Tesso Nilo. Sebanyak 400 tumbuhan hasil kegiatan pembibitan tersebut merupakan bagian dari bibit yang ditanam pada kegiatan penanaman pohon di TNTN. Sementara itu 3.200 bibit lainnya yang ditanam pada kegiatan ini merupakan bantuan dari BP-DAS Indragiri Rokan.

Sementara itu, Program Manager WWF-Indonesia Program Riau, Suhandri menyatakan, "Kegiatan seperti ini diharapkan dapat menggerakkan upaya yang lebih besar dari pemerintah dan pemangku kepentingan di Tesso Nilo untuk bersama-sama melestarikan kawasan konservasi ini". "Tata batas taman nasional yang jelas menjadi satu hal yang penting untuk menghindari tumpang tindih lahan di kawasan tersebut, "tambahnya.



Ka.BTNTN, Hayani Suprahman menyerahkan bibit kepada Bupati Pelalawan, Rustam Effendi menandai dimulainya restorasi di TNTN.

Tesso Nilo merupakan salah satu blok hutan dataran rendah yang masih tersisa di Pulau Sumatera yang terletak di Provinsi Riau. Sebagian hutan Tesso Nilo ditunjuk menjadi taman nasional pada 19 Juli 2004 dengan luas 38.576 ha yang mana sebagian besar berada di Kabupaten Pelalawan. Terdapat dua kantong habitat gajah di kawasan hutan ini yang meliputi kawasan taman nasional dan kawasan di luar taman nasional sehingga perlu dilakukan perluasan untuk dapat mengurangi konflik manusia-gajah. Pada 15 Oktober 2009, Taman Nasional Tesso Nilo akhirnya diperluas berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan nomor 663/Menhut-II/2009 menjadi ± 83.000 ha.

Perluasan Taman Nasional Tesso Nilo merupakan perwujudan komitmen bersama antara Departemen Kehutanan, pemerintah Provinsi Riau dan Kabupaten Pelalawan seperti tercantum dalam Kesepakatan Bersama mengenai Perluasan Taman Nasional Tesso Nilo dan Penanganan Illegal Logging, Perambahan dan Kebakaran Hutan dan Lahan di kawasan Tesso Nilo pada Agustus 2008. Menurut data WWF dan BTNTN, estimasi luasan kawasan yang dirambah di dalam Taman Nasional Tesso Nilo lewat estimasi citra satelit hingga akhir 2008 mencapai kurang lebih 8.600 ha. Untuk itu perlu dilakukan upaya nyata untuk memulihkan kawasan yang telah terdegradasi tersebut.(Syamsidar)